



Cegah Kebocoran PAD

Dewan Usulkan "E-Ticketing" di DTW Tanah Lot

Tabanan (Bali Post) -

Adanya sinyalemen kebocoran tiket masuk wilayah DTW Tanah Lot mulai disikapi DPRD Tabanan. Hal ini menjadi sorotan Dewan hingga diusulkan penggunaan sistem *e-ticketing*, sehingga lebih transparan dan akurat.

Usulan tersebut disampaikan dalam koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tabanan Sri Labantari dengan pengelola DTW Tanah Lot, Kamis (2/7) kemarin di Wantilan Tanah Lot.

Tak hanya *e-ticketing*, Suadnya Dharma menyoroti soal sistem tiket di Tanah Lot yang masih manual. I Made Dirga mengusulkan agar ada upaya dari manajemen

Tanah Lot untuk meningkatkan pendapatan selain dari tiket. Dirga melihat di areal Tanah Lot ada hotel, restoran maupun *artshop* yang merupakan potensi pendapatan. "Apa mereka tidak dikenakan retribusi dan masuknya ke mana?" tanya Dirga.

Sementara itu, Made Asta Darma langsung menohok soal lambannya penerapan *e-ticketing* di DTW Tanah Lot. "Sepengetahuan saya dulu pengelola Candi Borobudur belajar ke

Tanah Lot, hasilnya mereka sudah lebih maju menerapkan *e-ticketing*, sementara kita di sini masih manual. Terkesan tidak ada pengembangan," ujarnya. Terkait areal parkir yang terbatas, ia mengusulkan adanya sistem parkir progresif.

Bahkan, Wayan Sudiana, anggota Banggar lainnya, juga menyoroti efisiensi dan efektivitas kelembagaan pengelola. "Saat ini saja sudah ada 150 personel apakah tidak akan



Bali Post/wan

PARKIR - Pengelola DTW Tanah Lot didesak segera berbenah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabanan. Selain disara-

nkan menggunakan *e-ticketing* untuk mencegah kebocoran, DPRD Tabanan juga meminta pengelola menata lahan parkir agar tidak semrawut.

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 16



Sumbungan. . .

efisien jika bisa mengurangi biaya pegawai. Jangan sampai nantinya besar pasak daripada tiang," sarannya.

Di sisi lain, Gusti Ngurah Sanjaya menyoroti soal pengawasan pelaksanaan laporan keuangan dan sistem tiketing di DTW Tanah Lot. Ia pun mendesak agar pengelola DTW Tanah Lot lebih mempertajam program kerja, sehingga nantinya kalangan dewan mengetahui dengan baik rencana program tersebut. "Selama ini dewan yang baru belum tahu, jadi kita minta *progress* DTW ke depan agar bisa evaluasi agar nantinya bisa memberikan masukan potensi apa yang masih bisa dikembangkan.

Banggar dalam hal ini tugasnya hanya mencari sumber data agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk menetapkan besaran PAD," jelasnya.

Terkait usulan dan masukan Banggar, Manajer Pengelola DTW Tanah Lot, Toya Adnyana, menyambut baik usulan *e-ticketing* tersebut, apalagi untuk transparansi pendapatan. Ia bahkan berharap program ini nantinya bisa dimunculkan tahun 2016. "Mudah-mudahan tahun 2016 bisa diterapkan, namun semuanya tergantung keputusan badan pengelola kami di manajemen tinggal melaksanakan," ucapnya. (kmb28)



Disinyalir, BBM Nelayan Dijual untuk Industri

Negara (Bali Post) -

Belakangan ini berkembang informasi kalau bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dalam pembelannya untuk kepentingan nelayan, disinyalir juga untuk kebutuhan industri di Desa Pengambangan. Dari informasi, Rabu (1/7), modus penjualan BBM bersubsidi untuk industri ini dilakukan dengan cara oknum-oknum pengepul solar minta surat rekomendasi dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Jembrana. Kemudian rekomendasi itu diduga dipakai untuk membeli solar ke SPBU. Setelah membeli solar dengan jumlah tertentu, solar itu tidak seluruhnya digunakan untuk operasional perahu, namun sebagian disisihkan, dikumpulkan dan dijual ke perusahaan.

Salah seorang warga Pengambangan yang minta tidak disebutkan identitasnya mengatakan, modus ini sudah biasa dilakukan.

Orang yang membeli solar itu memang mendapat kepercayaan dari pemilik perahu, sehingga dia mengajukan izin mengatasnamakan pemilik perahu. Namun saat solarnya sudah didapat, tidak seluruhnya diberikan untuk kebutuhan perahu.

Selain dijual untuk industri, oknum pengepul solar ini juga menjual ke perahu-perahu kecil jenis fiber, yang saat musim tangkap jatah dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) tidak mencukupi untuk melaut.

Dikatakan juga, dengan modus seperti itu, oknum pengepul mendapatkan keuntungan berlipat ganda, selain dari pemilik perahu, juga dari selisih harga BBM subsidi yang dijual untuk industri. "Ini harus diantisipasi oleh aparat jangan sampai ada penimbunan solar," jelasnya.

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Kehutanan Jembrana Made Maharim-

bawa ketika dikonfirmasi mengaku pihaknya belum tahu ada modus seperti itu, karena hanya memberikan rekomendasi. Namun, pihaknya akan melakukan pengecekan ke bawah, termasuk pengetatan pemberian rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan. Bahkan jika perlu, orang yang mengurus pemilik perahu sendiri, atau ada surat kuasa darinya ke pengurus perahunya.

Untuk memantau distribusi BBM, baik yang dibeli di SPBN maupun SPBU, pihaknya bekerja sama dengan pihak Pelabuhan Perikanan Nusantara agar mengawasi, bahwa benar perahu yang membeli BBM berangkat melaut. Dia mengatakan, pihaknya memberikan rekomendasi pembelian BBM untuk nelayan, khususnya ke SPBU jika SPBN kehabisan stok, dengan kuota dan batas waktu tertentu. "Jika stoknya masih jelas kami tidak berikan," jelasnya. (kmb)

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 14



Juli, Raskin Disalurkan Dua Kali

Tabanan (Bali Post) -

Hari raya umat Hindu yaitu Galungan dan Kuningan serta hari raya umat Muslim Lebaran jatuh pada bulan Juli 2015. Untuk itu, Pemkab Tabanan menggelontorkan alokasi beras miskin (raskin) dua kali tepatnya awal Juli dan akhir Juli. Pengelontoran raskin dua kali di bulan Juli ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat tidak mampu di Tabanan dalam menyambut hari raya.

Kepala Bagian SDA Setda Kabupaten Tabanan I Gusti Putu Ekayana, Kamis (2/7) kemarin memaparkan, alokasi raskin tahap pertama sudah mulai digelar Rabu (1/7) kemarin hingga Selasa (7/7). Untuk jatah raskin bulan Agustus akan diberikan lebih awal yaitu pada akhir bulan Juli ini. "Diharapkan dengan pemberian raskin sebanyak dua kali di bulan Juli bisa membantu masyarakat tidak mampu menyambut hari raya, mengingat harga kebutuhan pokok menjelang hari raya selalu mengalami peningkatan harga," jelas Ekayana.

Total raskin yang disalurkan 576.390 kg untuk 19.231 RTS tersebar di 10 kecamatan di Tabanan. Dalam droping raskin ini, menurut Ekayana, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Perum Bulog Divre Bali dan telah membuat Surat Pemohonan Alokasi (SPA) untuk alokasi bulan Juli dan Agustus yang akan didistribusikan di awal dan akhir Juli.

Sebagai langkah awal persiapan sebelum beras didistribusikan, lanjut Ekayana, pihaknya telah melakukan pengecekan kualitas raskin di gudang Bulog Kediri. "Dalam pengecekan, sampel raskin kami ambil secara acak. Hasilnya kualitas raskin untuk RTS di Tabanan baik dan layak konsumsi. Di mana dari ukuran tingkat kotoran dan beras pecah, masih di bawah ambang batas yang ditentukan. Distribusi raskin tahap pertama sendiri telah dilakukan sejak Rabu kemarin.

Selain memantau kualitas raskin, menurut Eka, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan distribusi raskin. (kmb24)

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 16



Singaraja (Bali Post) -

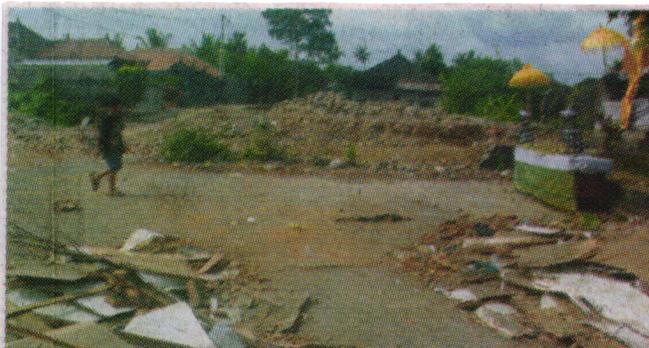
Setelah memutuskan kontrak dengan pihak rekanan pemenang tender, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Buleleng kembali menenderkan proyek pembangunan gedung Kantor Camat Sukasada. Untuk tender kedua ini, proyek bernilai lebih dari Rp 3 miliar itu masa pekerjaannya selama 135 hari. Meski dengan waktu yang berkurang dari tender pertama, pemerintah daerah optimis jika proyek ini akan bisa rampung akhir tahun anggaran 2015 ini.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan, Kamis (2/7) kemarin, menyebutkan dokumen lelang proyek yang kedua ini sudah diproses oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Buleleng, sejak Senin (29/6) lalu. Kelompok Kerja (Pokja) ULP saat itu telah mengumumkan secara terbuka agar mendapat penawaran dari pihak rekanan.

Kepala ULP, Ida Bagus Gde Surya Bharata, mengatakan, dari dokumen lelang yang masuk pihak Dinas PU Buleleng telah mengurangi batas waktu pekerjaan proyek tersebut. Jika sebelumnya pekerjaan ditarget kelar dalam waktu 180 hari, namun dalam tender ulang ini, Dinas PU mamatok batas waktu menjadi 135 hari. Meski batas waktu dipersingkat, namun Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai *leading sector* dari proyek ini optimis proyeknya bisa berjalan dan rampung dikerjakan sisa waktu 135 hari. Hal ini karena lahan proyek yang sudah disiapkan, sehingga tinggal memulai pekerjaannya dan tidak lagi membongkar bangunan lama. Untuk itu, Surya berharap dalam proses tender nanti tidak ada kendala. "Berkas sudah masuk dan kami telah umumkan untuk ditawarkan oleh rekanan. Mudah-mudahan tidak gagal tender. Kalau ini berjalan lancar, dengan waktu itu Dinas PU menyatakan masih bisa dilaksanakan," tegasnya.

Sebelumnya, pembangunan gedung Kantor Camat Sukasada ini telah dimulai dikerjakan oleh rekanan PT Cahaya Dewata Mandiri yang sudah dinyatakan sebagai pemenang tender. Dalam kontrak kerja, proyek terse-

Proyek Kantor Camat Sukasada Ditender Ulang



Bali Post/kmb38

PROYEK - Gedung Kantor Camat Sukasada telanjur dibongkar oleh rekanan pemenang tender. Proyek ini terpaksa dihentikan oleh Dinas PU karena rekanan pemenang tender memalsukan dokumen penjaminan proyek.

but harus rampung dalam waktu 180 hari. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, rekanan kemudian memulai membongkar gedung Kantor Camat Sukasada sejak bulan April 2015 lalu. Selama proyek pembangunan dimulai, aktivitas perkantoran dipindah ke sebelah barat SPBU Sukasada dengan menyewa bangunan tempat tinggal selama delapan bulan.

Pembongkaran bangunan lama hampir seluruhnya rampung. Tiba-tiba di tengah penyiapan lahan itu, Dinas PU Buleleng terpaksa memutuskan kontrak. Pemutusan kontrak kerja karena Dinas PU mendapat pengaduan kalau rekanan telah memalsukan dokumen penjaminan pada saat tender.

Dalam pengaduan itu, ditemukan berkas dokumen penjaminan material baja ringan yang dipakai dalam proyek pembangunan gedung Kantor Camat Sukasada itu dipalsukan. Dalam dokumen penjaminan itu, rekanan mencantumkan daya tahan baja ringan sampai 25 tahun. Setelah ditelusuri ke pihak distributor, ternyata tidak ada jaminan terkait batas

usia baja sampai 25 tahun tersebut. Hasil pengaduan ini, pihak Inspektorat meminta agar Dinas PU memutuskan kontrak kerja dengan rekanan pemenang tender.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Buleleng, I Nyoman Gede Suryawan, mengatakan, meski sudah memutuskan kontrak pekerjaan tapi pemerintah daerah tidak ada yang dirugikan. Hal ini karena sejauh ini pemerintah belum sempat membayar pekerjaan yang dilakukan oleh pihak rekanan. Hanya, Dinas PU terpaksa mencari rekanan pengganti melalui tender kedua. Sementara sisa waktu tahun anggaran ini efektif tidak lebih dari empat bulan ke depan. Untuk mencegah proyek itu mandek, sehingga tender kedua pun digenjut agar proyek mulai dikerjakan dan rampung dalam tahun anggaran 2015 ini. "Karena di awal dan kami belum membayar apa pun dan keburu ada pengaduan pelanggaran dokumen penjaminan itu, sehingga kita putus kontraknya," tegasnya. (kmb38)



Suambara Serahkan Rancangan Perubahan APBD 2015 kepada Dewan

Perubahan APBD Badung TA 2015

Dirancang Meningkatkan

RANCANGAN Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran (TA) 2015 mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari pendapatan daerah dan belanja daerah yang dirancang meningkat dari APBD induk. Hal tersebut terungkap saat Kepala Bappeda Litbang Badung I Wayan Suambara menyerahkan Rancangan Perubahan APBD Badung TA 2015 kepada DPRD Badung yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa didampingi Ketua Komisi III DPRD Badung I Nyoman Satria di Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Kamis (2/7) kemarin.

Kepala Bappeda Litbang I Wayan Suambara didampingi Kabag Keuangan I Ketut Gede Suyasa menyampaikan bahwa tema pembangunan Kabupaten Badung tahun 2015 adalah "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan". Dijelaskannya, pendapatan daerah pada rancangan perubahan dirancang Rp 3,6 triliun lebih atau meningkat 11,07 persen. Pendapatan daerah terdiri

dari pendapatan asli daerah dirancang Rp 2,8 triliun lebih atau meningkat 9,69 persen. Dana perimbangan dirancang Rp 351 miliar lebih, meningkat 0,56 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 427 miliar lebih, meningkat 33,71 persen. Sementara belanja daerah, dirancang Rp 4,0 triliun lebih atau meningkat 14,45 persen. Terdiri dari belanja tidak langsung dirancang Rp 2,1 triliun lebih, meningkat 15,56 persen dan belanja tidak langsung langsung dirancang Rp 1,8 triliun lebih, meningkat 13,14 persen.

Suambara menjelaskan komposisi rancangan perubahan APBD 2015, di mana kontribusi PAD terhadap to-

tal pendapatan daerah pada rancangan perubahan sebesar 78,42 persen. Sedangkan kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah yang lainnya terhadap total pendapatan, pada rancangan perubahan sebesar 21,58 persen. Alokasi belanja tidak langsung dirancang 54,44 persen dan belanja langsung dirancang 45,56 persen. Sementara komposisi belanja daerah berdasarkan penerima manfaat, belanja publik 68,98 persen, belanja aparatur 31,02

persen. Alokasi anggaran pendidikan dari total APBD 21,53 persen dan alokasi anggaran kesehatan 12,84 persen.

Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku, sehingga dokumen rancangan perubahan APBD tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen yang diterima ini selanjutnya akan dibuatkan agenda pembahasan di DPRD. "Sudah menjadi

kewajiban kami di DPRD untuk mengagendakan, dan agenda pembahasan APBD perubahan sudah dibuat, sehingga sudah siap *starting* membahas ini," jelasnya.

Suiasa juga menilai, komposisi rancangan Perubahan APBD 2015 sudah sangat baik dan mengalami peningkatan. "Dengan anggaran yang meningkat, tentu akan berdampak pula pada peningkatan pembangunan di segala sektor sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya. (ad188)



PERUBAHAN - Kepala Bappeda Litbang Badung I Wayan Suambara menyerahkan Rancangan Perubahan APBD Badung TA 2015 kepada Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa di Kantor DPRD Badung, Puspem Badung, Kamis (2/7) kemarin.



Tahun Ini, Pemkab Badung Kembali Helat FBP Ke-4

FESTIVAL Budaya Pertanian (FBP) kembali digelar tahun ini. FBP yang akan dihelat 4-7 Juli mendatang di kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, merupakan kegiatan yang ke-4. FBP sendiri digelar dalam rangka membangun citra Badung Utara dengan memanfaatkan potensi pertanian dan keindahan alam yang eksotik dan semakin ramai dikunjungi masyarakat.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan (DP2K) IGAK Sudaratmaja, Kamis (2/7) kemarin, menyatakan festival yang digelar kali ini tidak saja bagaimana mempromosikan potensi pertanian, tetapi yang utama adalah penginvestasian dan pengedukasian masyarakat bagaimana sektor pertanian ternyata bisa bersinergi dengan pariwisata. "Output yang ada di dalamnya, nilai investasi, edukasi, sehingga dari kegiatan ini dapat meningkatkan daya saing Badung Utara," ucapnya.

Tahun ini FBP bertemakan

"Suksma Dresta Laksana" yang artinya berterima kasih adalah kewajiban mulia. Menurut Sudaratmaja, tema ini merujuk pada periode berakhirnya masa jabatan Bupati Badung A.A. Gde Agung pada 5 Agustus 2015 mendatang. "Kita harus mengakui bapak bupati akan meninggalkan jabatannya. Makanya, tema ini diambil sebagai ucapan terima kasih. Bapak bupati berterima kasih kepada masyarakat, masyarakat berterima kasih kepada bupati, katanya. Bahkan, imbuh Sudaratmaja, tema ini juga bermakna ungkapan rasa terima kasih petani kepada alam atas hasil panen yang mereka dapat.

Dikatakannya, dari pengalaman tiga kali festival, pemerintah mengklaim adanya nuansa budaya pertanian yang ternyata direspons sangat positif oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pengalaman dan pengamatan di masyarakat, di mana potensi dan emosi seni masyarakat Bali memang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang da-

pat dipakai untuk menawarkan ide-ide pembaharuan dan penguatan eksistensi pembangunan, khususnya pembangunan pertanian di masyarakat. Berkacamata pada pengalaman, kegiatan FBP tidak seremonial belaka. Sebagai bukti, dari tahun ke tahun adanya perubahan respons masyarakat yang awalnya apatis menjadi semakin bergairah. "Sekarang yang ingin ikut berjualan maupun keterlibatan saat pembukaan festival makin meningkat," jelasnya.

Pada FBP kali ini, juga akan diperkenalkan teh gumitir. Masyarakat bisa mengetahui, ternyata bunga gumiter bisa disulap menjadi teh gumitir. Walaupun baru dilaksanakan tiga kali dan pelaksanaan tahun 2015 ini adalah kegiatan FBP ke-4, namun pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus. Malah, kata Sudaratmaja, tahun 2014 lalu FBP sudah mampu keluar sebagai "Top 99" Inovasi Pelayanan Publik, menyisihkan lebih dari 500 peserta lomba dari kementerian, lembaga, pemda, provinsi, kabupaten dan kota.

Sudaratmaja menambahkan, pada FBP ke-4 tahun ini, Pemkab Badung telah melakukan MoU dengan sembilan perusahaan. Nilai kontrak kerja sama itu total Rp 8,1 miliar. Jenis produk pertanian yang masuk kontrak dengan pihak perusahaan antara lain kopi, aneka sayuran, buah, bunga gumitir, beras organik, edamame, jambu kristal, jeruk siam. Untuk nilai tertinggi adalah jambu kristal dan jeruk siam senilai Rp 600 juta. Kontrak selama satu tahun, bahkan dengan tiga swalayan sekaligus. (ad191)



FBP - Kepala DP2K Badung IGAK Sudaratmaja memberikan penjelasan terkait FBP yang akan dihelat 4-7 Juli mendatang di kawasan Jembatan Tukad Bangkung, Desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 2



Tunggakan PHR Capai Rp 2,4 Miliar

Dispenda Genjot Penagihan Langsung

Singaraja (Bali Post) –

Menyusul tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tahun 2014 yang mencapai Rp 2,4 miliar, membuat Pemkab Buleleng bekerja keras untuk menagih tunggakan pajak tersebut. Hasilnya, dari total tunggakan tersebut, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Buleleng telah berhasil menagih tunggakannya hingga menyisakan Rp 800 juta. Meski sudah berhasil menagih tunggakan PHR itu, Dispenda Buleleng masih khawatir jika tahun 2015 ini tunggakan kembali muncul.

Demikian terungkap dalam rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2014 di ruang gabungan komisi Kamis (2/7) kemarin. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng I Gede Supriatna bersama anggota Banggar. Sementara TAPD dipimpin oleh Sekkab Buleleng, Ir. Dewa Puspaka, M.P.

Sekab Buleleng Dewa Ketut Puspaka didampingi Kepala Dispenda Ida Bagus Puja Erawan usai rapat mengatakan, PHR belakangan ini menjadi salah satu sektor penopang pendapatan asli daerah (PAD) di daerah ini. Hanya, dalam perjalanannya pemerintah daerah masih mengalami hambatan dalam memungut PHR. Hal ini karena pemilik hotel maupun restoran banyak yang kurang disiplin dalam menyetorkan pajak yang menjadi titipan

wisatawan yang berkunjung ke Buleleng. Kondisi ini memicu adanya tunggakan PHR yang nilainya cukup signifikan. Dia mencontohkan, tahun 2014 lalu, tunggakan pajak ini mencapai Rp 2,4 miliar. "Sektor ini sangat potensial untuk menopang PAD kita. Masalah yang masih terjadi adalah tunggakan akibat pengusaha yang kurang disiplin menyetorkan titipan pajak," katanya.

Dari pendekatan yang dilakukan selama proses penagihan tunggakan tersebut, kata Puja Erawan, pengusaha ini cenderung beralih tidak menyetorkan PHR karena kondisi tingkat hunian hotel atau kunjungan tamu ke restoran sepi. Selain itu, pengusaha ini juga beralasan kalau usahanya sedang vakum karena masih dalam tahap renovasi. Bahkan, ada pengusaha yang beralih kalau kesulitan finansial, sehingga terpaksa memanfaatkan dana pajak untuk biaya karyawan atau operasional usahanya. "Ini alasan klasik dan kami sudah memberikan pembinaan dan menyadarkan pengusaha bahwa pajak ini bukan haknya tapi titipan tamu," tegasnya.

Meski sering menerima alasan klasik seperti itu, lanjut Puja Erawan, sampai saat ini dari total tunggakan PHR itu, pihaknya telah berhasil melakukan penagihan dengan realisasi yang cukup signifikan. Sisa tunggakan yang belum berhasil ditagih Rp 800 juta. Atas kondisi ini, pihaknya menjamin kalau sisa tunggakan

PHR tersebut dapat ditagih hingga 100 persen hingga akhir tahun anggaran 2015.

Hanya, untuk tahun 2015 ini, pemerintah daerah kembali khawatir kalau tunggakan PHR akan muncul kembali. Hal ini karena tidak menutup kemungkinan kalau pengusaha kembali menunda menyetorkan pajaknya kepada daerah. Untuk mengatasi hal itu, Dispenda Buleleng tetap menggenjot sosialisasi dan menyadarkan pengusaha agar tidak menunda menyetorkan PHR. Bahkan, jika kebiasaan ini terus diulangi, pemerintah daerah merencanakan akan menempuh jalur hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang "nakal" tersebut. "Kalau masih melanggar, kami akan menempuh jalur hukum," tegasnya.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Buleleng dalam rapat kemarin, lebih banyak menyoroti adanya sumber-sumber pendapatan yang belum menghasilkan sesuai rencana. Seperti diungkapkan anggota Banggar DPRD Buleleng I Gede Wisnaya Wisna. Dia mencontohkan, pungutan pajak sarang burung walet atau burung sriti yang realisasinya masih nol persen dalam tahun 2014 lalu. Selain itu, pungutan retribusi material golongan C yang memiliki potensi begitu besar, namun malah tidak digarap untuk menjadi pundi-pundi penopang PAD. Atas kondisi ini, dewan pun mengisyaratkan tahun depan kedua sektor ini dievaluasi kembali. (kmb38)

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 13



Wabup Kembang: Tidak Perlu Program Hebat

Negara (Bali Post) -

Sejumlah kelompok dan organisasi masyarakat di tingkat desa diminta untuk lebih tertib dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan yang diberikan. Tidak perlu program hebat, tetapi SPJ-nya kacau balau. Imbauan itu disampaikan Wakil Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Selasa (30/6) saat melakukan kunjungan ke Desa Delodberawah dan Desa Pergung, Mendoyo.

Wabup Kembang yang mewakili Bupati Jembrana I Putu Artha yang sedang mengikuti Pendidikan Kepemimpinan mengajak kelompok untuk tertib penggunaan dan SPJ. "Lebih baik kita tertib dan sesuai aturan, tidak perlu program hebat-hebat tetapi kacau balau," tegas Kembang.

Di hadapan ratusan warga, Kembang mengungkapkan, sebelum dirinya bersama Bupati Artha memimpin Jembrana, opini Jembrana langganan *disclaimer* pasti tidak wajar. Artinya pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangannya kacau balau.

Namun, secara bertahap pengelolaan dan sistem pertanggungjawaban ditata dan

opini BPK pun mengalami perbaikan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun, hingga pada tahun keempat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih. "Keberhasilan ini berkat dukungan dan kerja sama masyarakat yang selama ini sudah cukup tertib dalam menggunakan anggaran daerah," terang Kembang.

Sementara itu, Perbekel Delodberawah Made Rentana dan Perbekel Pergung Ketut Wimarta mengungkapkan, bantuan dan perhatian Pemkab Jembrana semasa pemerintahan Bupati Artha dan Wakilnya Kembang Hartawan jumlah bantuan yang diberikan sudah cukup banyak dan merata, begitu pula dengan pembangunan infrastruktur terutama jalan. Kini APBDes yang dikelola desa juga mencapai miliaran rupiah. (kmb26)



Bali Post/olo

BANTUAN - Wabup Jembrana I Made Kembang Hartawan meminta masyarakat penerima bantuan untuk tertib pertanggungjawaban.

Edisi : Jumat, 3 Juli 2015

Hal : 14